



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bimbingannya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dirangkum dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) sebagai bentuk pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat yang mencakup gambaran dan penjelasan atas seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu tahun 2020, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Selanjutnya kami berharap dengan penyampaian RLPPD ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Ihdinashirotolmustaqim,

Wabillahitaufiq wal hidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

RLPPD Kabupaten Malang Tahun 2020 ini memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang kurun waktu tahun 2020, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 disusun oleh Pemerintah Kabupaten Malang sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Penyusunan RLPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab IV, Pasal 23 yang menjelaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan / atau media elektronik.

Ringkasan LPPD menjadi bahan masukan bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu kami sampaikan ringkasan LPPD yang disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian serta sinkronisasinya dengan penerapan kebijakan pemerintah maka beberapa indikator makro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 mengalami deviasi sesuai dengan rencana jangka menengah yang sudah ditetapkan. Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam memperkirakan kondisi makro ekonomi Kabupaten Malang adalah pada strategi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dimaksud yang pada amanahnya menggariskan tiga strategi umum, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan;
2. Mengoptimalkan potensi sektor pariwisata;
3. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup.

Ketiga strategi tersebut apabila digrafiskan hubungan saling keterikatannya tersaji seperti gambar berikut :

Strategi Pembangunan Kabupaten Malang



Dengan strategi tersebut maka dalam memprediksi dan merencanakan target pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berpihak pada masyarakat dengan mempertimbangkan dari capaian kinerja pertumbuhan ekonomi dan juga mempertimbangkan capaian kinerja dari beberapa indikator kinerja pembangunan lainnya.

Analisis Pola Pikir dan pertimbangan-pertimbangan lain tersaji pada dokumen Studi Perencanaan Kebijakan Ekonomi Makro dalam mengakselerasikan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang tahun 2016-2020. Adapun capaian kinerja makro Kabupaten Malang dengan beberapa indikator makro sebagai berikut:

**Capaian Kinerja Makro
Kabupaten Malang**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,35	70,36	0,014
2	Angka Kemiskinan	9,47	10,15	7,181
3	Angka Pengangguran	3,70	5,49	48,378
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,549	-2,68	-148,727
5	Pendapatan Per kapita	39,78	38,90	-2,212
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.382	0.371	-2,88

Sumber : BPS Kabupaten Malang

1. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kondisi kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Malang berikut ini:

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Makro	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Indeks Pembangunan Manusia	67,51	68,47	69,4	70,35	70,36

Sumber: BPS Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang senantiasa mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang pada tahun 2016 berada pada level 67,51 persen, Tahun 2017 sebesar 68,47 persen, Tahun 2018 sebesar 69,4 persen, Tahun 2019 menjadi 70,35 dan pada tahun 2020 sebesar 70,36 persen. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ini disebabkan mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

2. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Malang senantiasa mengalami trend yang signifikan menurun berada pada level 9,47 persen, namun pada Tahun 2020 angka kemiskinan mengalami kenaikan berada pada level 10,15 persen. Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Angka Kemiskinan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Makro	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Angka Kemiskinan	11,49	11,04	10,37	9,47	10,15

Sumber: BPS Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil pemutakiran data yang sudah dilakukan oleh Tim Verifikasi Kabupaten Malang pada tanggal 27 Juni 2019, di Kabupaten Malang terdiri dari 26 Desa Mandiri, 170 Desa Maju, dan 182 Desa Berkembang dan untuk hasil pemutakiran data yang dilakukan di tahun 2020 oleh Tim Verifikasi Kabupaten Malang terdiri dari 40 Desa Mandiri, 188 Desa Maju, dan 150 Desa Berkembang. Perkembangan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

No	Status Desa	2019	2020	Naik Status	Turun Status
1	Mandiri	26	40	14	0
2	Maju	170	188	18	0
3	Berkembang	182	150	0	32
Total		378	378	32	32

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang

3. Angka Pengangguran

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh Pemerintah Daerah maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kondisi tingkat pengangguran di Kabupaten Malang berikut ini:

Angka Pengangguran Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Makro	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Angka Pengangguran	4,8	4,6	3,15	3,70	5,49

Sumber: BPS Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 5 (lima) tahun Angka Pengangguran Kabupaten Malang senantiasa mengalami penurunan berada pada level 3,15 persen pada Tahun 2018, namun pada Tahun 2019 berada pada level 3,70 persen dan pada Tahun 2020 berada pada level 5,49 persen. Hal ini disebabkan karena banyaknya angka usia produktif yang belum

mendapatkan pekerjaan, sehingga Pemerintah Kabupaten Malang masih perlu menambah peluang kerja salah satunya dengan menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah serta komitmen pemerintah Kabupaten Malang dalam mempermudah investasi.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malang dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang berikut ini:

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Makro	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	5,43%	5,56%	5,5%	-2,68%

Sumber : BPS Kabupaten Malang

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Malang senantiasa mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang pada Tahun 2016 berada pada level 5,3 persen, Tahun 2017 sebesar 5,43 persen, Tahun 2018 sebesar 5,56 persen, Tahun 2019 menjadi 5,5 persen dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -2,68 persen. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan disebabkan karena dampak adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Pendapatan Per Kapita

Pertumbuhan Perkapita Kabupaten Malang (PDRB per Kapita) terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 sebesar 39.820 ribu rupiah dan mengalami penurunan pada Tahun 2020

sebesar 38.900 ribu rupiah. Salah satu faktor penurunan dari pendapatan per kapita Kabupaten Malang adalah pengaruh pandemi Covid-19. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Malang berikut ini:

Pendapatan Perkapita Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Makro	Tahun (dalam Ribuan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PDRB per Kapita	31.934	34.528	37.359	39.820	38.900

Sumber: BPS Kabupaten Malang

6. Ketimpangan Pendapatan

Pada periode Tahun 2016-2020, perekonomian Kabupaten Malang mengalami pertumbuhan dengan laju yang tidak signifikan. Sebaliknya, tingkat inflasi di Kabupaten Malang semakin kecil dengan kata lain mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Malang di Kabupaten Malang semakin membaik. Adapun Inflasi Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berikut ini:

Inflasi Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Makro	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Inflasi	2,62%	3,75%	2,98%	1,93%	1,42%

Sumber: BPS Kabupaten

Berdasarkan tabel tersebut, laju perkembangan inflasi semakin menurun sehingga diharapkan dapat menambah laju pertumbuhan ekonomi, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Inflasi Kabupaten Malang pada Tahun 2016 mencapai 2,62 persen, Tahun 2017 sebesar 3,75 persen, Tahun 2018 sebesar 2,98 persen, Tahun 2019 menjadi 1,98 persen dan pada tahun 2020 sebesar 1,42 persen.

Inflasi di Kabupaten Malang pada Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga dengan inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi inflasi stimulator dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang, dengan inflasi yang terkendali akan menambah keuntungan pengusaha dan menggalakkan investasi di Kabupaten Malang sehingga diharapkan akan mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi.

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Dasar;
- b. Pendidikan Kesetaraan;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini.

1.1 Target Pencapaian Urusan Pendidikan

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sebagai berikut:

Target Pencapaian Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah anak usia sekolah	Jumlah anak bersekolah dan tamat sekolah	Capaian = $(4):(3) \times 100\%$	Realisasi Anggaran 2020
1	2	3	4	5	6
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	352.303	377.463	93,33%	100%
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	8.263	17.463	47,32%	78,55%
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	75.464	83.672	90.19%	99,80%

1.2 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan sebagai berikut:

Realisasi Urusan Pendidikan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target 2020	Realisasi 2020			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/ MTs)	100%	352.303	377.463	93,33%	Jumlah Warga Kabupaten/Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs) Dibagi Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun x 100%
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	8.263	17.463	47,32%	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah x 100%

2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan *tuberculosis*;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

2.1 Target Pencapaian Urusan Kesehatan

Target pencapaian adalah target sebagaimana dalam ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan sebagai dasar penentuan target daerah yang ditetapkan dalam mencapai SPM selama kurun waktu Tahun 2020 sebagai berikut:

Target Pencapaian Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian = (5):(4)X100%	Realisasi Anggaran 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	41.614	40.441	97,18	14.593.900
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	39.723	39.253	98,82	14.880.500
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	37.831	37.601	99,39	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	150.846	142.698	94,60	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	396.798	289.657	73,00	53.380.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	1.669.179	464.270	27,81	245.884.256
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	371.977	177.705	47,77	59.280.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian = (5):(4)X100%	Realisasi Anggaran 2020
1	2	3	4	5	6	7
8	Pelayanan kesehatan penderit hipertensi	Jumlah Warga Negara penderit hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	704.698	154.106	21,87	10.130.000
9	Pelayanan kesehatan penderit <i>diabetes mellitus</i>	Jumlah Warga Negara penderit <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	35.954	34.501	95,96	10.130.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	4.978	4.968	99,80	3.240.000
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis	Jumlah Warga Negara dengan <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	26.799	9.005	33,60	6.100.430.788
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	44.421	31.581	71,09	1.508.470.181

2.2 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan sebagai berikut:

Realisasi Urusan Kesehatan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target 2020	Realisasi 2020			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	40.441	41.614	97,18	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten/ Kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun dibagi Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
2.	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	39.253	39.723	98,82	Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/ Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target 2020	Realisasi 2020			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	37.601	37.831	99,39	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	142.698	150.846	94,60	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada pada kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	289.657	396.798	73,00	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran x 100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	464.270	1.669.179	27,81	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/ kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah Warga Negara usia 15-59 tahun di kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun x 100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	177.705	371.977	47,77	Jumlah Warga Negara berusia 60 tahun/ lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten / kota dalam kurun waktu 1 tahun dibagi Jumlah semua Warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/ kota dalam kurun waktu 1 tahun x 100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	154.106	704.698	21,87	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/ kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama x 100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	34.501	35.954	95,96	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun yang yang sama x 100%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target 2020	Realisasi 2020			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	4.968	4.978	99,80	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosi	Jumlah Warga Negara dengan Tuberculosis (TB) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	9.005	26.799	33,60	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu 1 tahun dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu 1 tahun yang sama x 100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	31.581	44.421	71,09	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/ kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama x 100%

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

3.1 Target Pencapaian Urusan Pekerjaan Umum

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu termasuk perhitungannya sebagai berikut:

Target Pencapaian Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan (jiwa)	Jumlah orang yang terlayani (jiwa)	Capaian = (4):(3)X 100%	Realisasi Anggaran 2020
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2.623.201	2.053.598	78,29 %	6.010.206.582 (DAK) 5.900.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan (jiwa)	Jumlah orang yang terlayani (jiwa)	Capaian = (4):(3)X 100%	Realisasi Anggaran 2020
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.623.201	2.057.522	78,44 %	2.838.289.880

3.2 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan sebagai berikut:

Realisasi Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target 2020	Realisasi 2018			Keterangan
				Pembilang (jiwa)	Penyebut (jiwa)	Nilai	
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	80 %	2.053.598	2.623.201	78,29 %	Jumlah penduduk yang dilayani s/d Tahun 2019 dibagi Jumlah penduduk Kabupaten Malang X 100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82%	2.057.522	2.623.201	78,44 %	Jumlah Penduduk Yang terlayani air limbah s/d Tahun 2019 dibagi jumlah penduduk Kabupaten Malang x 100%

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perumahan;
- b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
- c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman.

4.1 Target Pencapaian Urusan Perumahan Rakyat

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sebagai berikut:

Target Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian = (4):(3) X 100%	Realisasi Anggaran 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagimasyarakat yang terkena arelokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.	0	0	0	0

4.2 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan sebagai berikut:

Realisasi Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target 2020	Realisasi 2020			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang memperolehPen yediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni	100%	0	0	0	$\frac{\text{Jumlah rumah korban bencana tahun n}}{\text{Jumlah rumah korban bencana yang diajukan tahun n}} \times 100\%$
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	0	0	0	$\frac{\text{Jumlah rumah terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota tahun n}}{\text{Jumlah rumah terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota diajukan tahun n}} \times 100\%$

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

5.1 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sebagai berikut:

Target Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian =(5):(4)X 100%	Realisasi Anggaran 2020
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	138	138	100%	481.572.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian = (5):(4)X 100%	Realisasi Anggaran 2020
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	93.171	93.171	100%	192.206.040
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15.112	15.112	100%	1.351.302.245
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.343	2.343	100%	138.000.000
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	75	78	104%	433.986.290

5.1 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan sebagai berikut:

Realisasi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target 2020	Realisasi 2020			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Pelayanan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (2.560.675 Jiwa/Sumber data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2015-2020)	138	138	138	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara dibagi Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena penegakan hukum Perda dan perkara x 100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	93.171	100	100	100%	Jumlah layanan informasi rawan bencana yang direncanakan dibagi Jumlah layanan informasi rawan bencana yang dilaksanakan x 100%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target 2020	Realisasi 2020			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15.112	100	100	100%	Jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang direncanakan dibagi Jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan x 100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.343	100	100	100	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang direncanakan Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran (2.560.675 Jiwa/Sumber data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2015-2020)	75	78	75	104%	Penanggulangan yang ditangani ≤ 2 jam dibagi Jumlah kejadian kebakaran dengan menggunakan skala kabupaten/kota x 100%

6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten Malang

6.1 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sebagai berikut:

Target Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian = (5):(4)X 100%	Realisasi Anggaran 2020
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	0	0	0	0
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	0	0	0	0
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantardi luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar Panti	0	0	0	0
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Pantai	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar Panti	0	0	0	0
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten Malang.	Jumlah korban bencana skala Kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat bencana dan pasca	241	241	100	162.600.000

5.2 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan sebagai berikut:

Realisasi Urusan Sosial

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi 2020			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	100	0	0	0	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti dibagi Jumlah keseluruhan warga kabupaten penyandang disabilitas di luar panti x 100%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi 2020			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Persentase (%) anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	0	0	0	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dibagi Jumlah keseluruhan anak terlantardi luar panti x 100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	100	0	0	0	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti dibagi Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar di luar panti x 100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	0	0	0	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dibagi Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis di luar panti x 100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat bencana dan pasca	100	241	241	100	Jumlah korban bencana yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca dibagi Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca x 100%

C. HASIL EVALUSAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil Evaluasi EPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang Tahun 2016 yaitu dengan skor 3,5126 atau dengan kategori prestasi **Sangat Tinggi**;
- b. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang Tahun 2017 yaitu dengan skor 2,8128 atau dengan kategori prestasi **Tinggi**;
- c. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang Tahun 2018 yaitu dengan skor 3,7800 atau dengan kategori prestasi **Sangat Tinggi**;
- d. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang Tahun 2019 masih dalam tahap penilaian.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malang oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

Opini laporan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH
1	Opini BPK atas LKD Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016 sampai dengan 2020 laporan keuangan Kabupaten Sidoarjo dengan Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK.

D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1. Target Dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp3.705.473.950.844,35 terealisasi 102,89% atau sebesar Rp3.812.475.626.802,86, yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 114,35%, Dana Perimbangan terealisasi 98,05%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 108,21%.

Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	509.599.102.162,35	583.195.875.569,86	114,70
2	Dana Perimbangan	2.249.739.180.814,00	2.205.934.268.183,00	98,05
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	945.735.667.868,00	1.023.345.483.050,00	108,21
	TOTAL	3.705.473.950.844,35	3.812.475.626.802,86	102,89

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Malang TA. 2020 (Unaudited)

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020 sebesar Rp583.195.875.569,86 atau tercapai sebesar 114,35% dari seluruh target PAD sebesar Rp509.999.102.162,35 Rincian realisasi dan target PAD tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	213.528.000.000,00	280.324.530.396,67	131,28
2	Hasil Retribusi Daerah	22.260.366.927,00	23.210.144.714,00	104,27
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.445.436.424,07	20.423.890.327,70	99,89
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	253.765.298.811,28	259.237.310.131,49	102,16
	Total	509.999.102.162,35	583.195.875.569,86	114,35

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Malang TA. 2020 (Unaudited)

b. Pendapatan Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp2.205.934.268.183,00 atau 98,08% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.249.739.180.814,00 Rincian target dan realisasi pendapatan dana perimbangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Dana Perimbangan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	182.901.444.814,00	167.386.623.750,00	91,52
2	Dana Alokasi Umum	1.592.832.074.000,00	1.570.043.946.000,00	98,57
3	Dana Alokasi Khusus	474.005.662.000,00	468.503.698.433,00	98,84
	Total Dana Perimbangan	2.249.739.180.814,00	2.205.934.268.183,00	98,05

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Malang TA. 2020 (Unaudited)

c. Lain - Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi atas Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut:

Lain - Lain Pendapatan Yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendapatan Hibah	267.113.900.000,00	286.101.322.694,00	107,11
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	184.493.271.618,00	243.115.671.694,00	131,77
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	85.076.215.000,00	85.076.215.000,00	100,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	29.655.651.250,00	29.655.651.250,00	100,00
5	Pendapatan Lainnya	379.396.630.000,00	379.396.622.412,00	100,00
	Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	945.735.667.868,00	1.023.345.483.050,00	108,21

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Malang TA. 2020 (Unaudited)

2. Belanja Daerah

Target belanja daerah untuk tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp4.145.907.996.483,42 dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp3.905.350.860.886,36 atau tercapai sebesar 94,20%, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.314.511.660.583,81	2.197.945.294.089,30	94,96
2	Belanja Langsung	1.831.396.335.899,61	1.707.405.566.797,06	93,23
	Total Belanja	4.145.907.996.483,42	3.905.350.860.886,36	94,20

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Malang TA. 2020 (Unaudited)

a. Belanja Langsung

Belanja Langsung tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.707.405.566.797,06 atau 93,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.831.396.335.899,61. Rincian realisasi belanja langsung adalah sebagai berikut :

Belanja Langsung

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	299.539.379.283,56	296.464.456.803,95	98,97
2	Belanja Barang dan Jasa	952.365.848.062,88	847.512.326.600,10	88,99
3	Belanja Modal	579.491.108.553,17	563.428.783.393,01	97,23
	Belanja Langsung	1.831.396.335.899,61	1.707.405.566.797,06	93,23

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Malang TA. 2020 (Unaudited)

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp2.197.945.294.089,30 atau 94,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.314.511.660.583,81. Rincian realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	1.283.047.781.202,89	1.203.062.490.326,88	93,77
2	Belanja Hibah	204.378.838.800,00	196.905.206.000,00	96,34
3	Belanja Bantuan Sosial	47.681.400.000,00	46.346.570.000,00	97,20
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17.538.296.388,00	16.921.821.574,50	96,48
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	574.653.497.600,00	574.653.490.012,00	100,00
6	Belanja Tidak Terduga	187.211.846.592,92	160.055.716.175,92	85,49
	Belanja Tidak Langsung	2.314.511.660.583,81	2.197.945.294.089,30	94,96

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Malang TA. 2020 (Unaudited)

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp447.233.043.789,47 atau 101,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp440.434.045.639,07. Penerimaan Pembiayaan, Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp465.233.043.789,47 atau 101,48%, dari target yang dianggarkan sebesar Rp463.629.565.832,59. Pengeluaran Pembiayaan, terealisasi sebesar Rp18.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Rincian realisasi pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	458.434.045.639,07	465.233.043.789,47	101,48
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	408.434.045.639,07	408.434.045.639,07	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	56.798.998.150,40	0,00
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	100,00
3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	440.434.045.639,07	447.233.043.789,47	101,54

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Malang TA. 2020 (Unaudited)

E. INOVASI DAERAH

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kabupaten Malang selama Tahun 2020 telah melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang telah berhasil memperoleh penghargaan dari Menteri Dalam Negeri berupa *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2020 dengan Skor 8.565 dengan Kategori **Sangat Inovatif**

Berikut daftar inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintah pada pemerintah Kabupaten Malang sebagai berikut:

Data Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2020

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah
1	WADOOL (Wadah Pengaduan Online)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	SI BANGJI (Inovasi Pengembangan Padi Brang Biji)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	SIAPIK	Inspektorat Daerah
4	PESAGI (Pelayanan Sabtu Pagi)	Kecamatan Gondanglegi
5	Pemanfaatan Sabo Dam dengan Waduk Memanjang di Sungai untuk Irigasi Sprinkle di Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
6	SP2D Online	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Bagum 3C	Bagian Umum
8	Bus Mushola	Bagian Umum
9	PERAMAL (Peramal Rabu Malam)	Kecamatan Tajinan
10	INOVASI eKEREN-KAN (Elektronik Keterangan Rencana Kabupaten) Kabupaten Malang	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Kerja
11	INOVASI "Si ROKET TERBAIK" (Sistem Pendorong Kinerja Terintegrasi Berbasis Kompetisi)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Kerja
12	SUMBER JENON	Kecamatan Tajinan
13	POSYANDU HOLISTIK INTEGRATIF (PHI)	Kecamatan Tajinan

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah
14	Soyo UPT Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
15	KOPI IRENG SENIN (Koordinasi Bareng setiap hari Senin)	Kecamatan Donomulyo
16	SEKAR SIBER (Surveillance Enumerasi Pekarangan untuk upaya Sehat, Indah, Bermanfaat, Ekonomis dan Resik)	Dinas Ketahanan Pangan
17	TANGKAS (Terapkan ANC berkualitas) Puskesmas Wagir	Dinas Kesehatan (Puskesmas Wagir)
18	MEKKAH (Motivasi Edukasi Kader Kusta Berkah) Puskesmas Ketawang	Dinas Kesehatan (Puskesmas Ketawang)
19	E-Sempurna	Dinas Lingkungan Hidup
20	Edu Sampah Cipta Kerja	Dinas Lingkungan Hidup
21	Integrated Resources Recovery Center (IRRC) Waste To Energi, Olah Sampah Jadi Energi Listrik, Jadi Pupuk, Air Sungai Bersih	Dinas Lingkungan Hidup
22	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Paras, Layanan Gas Methane Menggunakan Bambu Petung	Dinas Lingkungan Hidup
23	TPA Sampah Wisata Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup
24	Bumdes Bersama Karlos Abadi (Pengembangan Usaha Unit Pertokoan dan Agen 46)	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
25	PISEMBAH NENEK	Dinas Kesehatan (Puskesmas Kromengan)
26	PAGER BETIS	Dinas Kesehatan (Puskesmas Pagelaran)
27	GERMAS BATIK	Dinas Kesehatan (Puskesmas Tajinan)
28	Kopi Tubruk (Kolaborasi Program terIntegrasi Tuberkulosis dengan riwayat, usia dan kadar gula) PKM Poncokusumo	Dinas Kesehatan (Puskesmas Poncokusumo)
29	"One-Three" One Day – One Thousand Services – One Thousand Data's - Puskesmas Kepanjen	Dinas Kesehatan (Puskesmas Kepanjen)
30	GERDU SAWAH (Gerakan Peduli Bersama Jiwa Sehat)	Dinas Kesehatan (Ardimulyo)
31	Si Canting New (Sistem Informasi Cegah Stunting)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Bululawang)
32	Pengembangan Aplikasi e-Musrenbang (menu Forum Perangkat Daerah)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
33	Home Delivery Service	Kecamatan Kromengan
34	SENSASI (Senin Sehat dengan Gizi dan Tablet Besi)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Ngajum)
35	PASTI TOB (Pasukan Identifikasi Tanggap Orang Batuk) Puskesmas Ngajum	Dinas Kesehatan (Puskesmas Ngajum)
36	PASAL GERCEP BER-KB (Pasca Salin Gerak Cepat ber-KB) Puskesmas Pakisaji Kabupaten Malang	Dinas Kesehatan (Puskesmas Pakisaji)

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah
37	E-KECAP (Edukasi Kesehatan Calon Pengantin)	Dinas kesehatan (Puskesmas Tumpang)
38	WONOSARI SEHATI (Sehat Tanpa TB)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Wonosari)
39	SINTA HARAPAN	Dinas Ketahanan Pangan
40	GERIMIS BUMI (Gerakan Suami Peduli Kelas Ibu Hamil)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sumbermajing Kulon)
41	Si - Patemo (Skrining Penyakit Tidak Menular Mobile) Puskesmas Pakisaji Kabupaten Malang	Dinas Kesehatan (Puskesmas Pakisaji)
42	Pelayanan Izin Trayek Terminal Sehari Jadi (PEYEK TERI)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu
43	GERDUMAS TB NEW (Puskesmas Sitarjo)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sitarjo)
44	Aplikasi DOS (Daftar Obat Simptomatis)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Tumpang)
45	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SiRendra)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
46	TERAS JATI (Puskesmas Karangploso)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Karangploso)
47	JURNAL ELEKTRONIK (E-JOURNAL) KARTA RAHARDJA	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
48	UKM Flash	Dinas Kesehatan (Puskesmas Ampelgading)
49	SiHARKEPO (Sistem Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok)	Dinas Komunikasi dan Informatika
50	Aplikasi Electronic Corporate Social Responsibility (e-CSR) Kabupaten Malang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
51	KLICK INTAN (Kelas Ibu Cegah Kematian Ibu dan Bayi di Pamotan)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Pamotan)
52	MONIC HIV	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sitarjo)
53	Teman Gemass "Tim STBM Ngantang Gerak Bersama Masyarakat Menuju Sanitasi Sehat" (Puskesmas Ngantang)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Ngantang)
54	Sistem Monitoring & Evaluasi Pembangunan (SMEP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
55	Pengenalan Arsip Pada Anak (PAPA)	Dinas Perpustakaan
56	"ALPARIZI CEMORO" Puskesmas Donomulyo	Dinas Kesehatan (Puskesmas Donomulyo)
57	SMART HEALTH (Systematic Medical Appraisal Referral and Treatment)	Dinas Kesehatan
58	MASSEGAR (mari semua segera berantas diare) Pagak	Dinas Kesehatan (Puskesmas Pagak)
59	GEMPITA TB	Dinas Kesehatan (Puskesmas Wonokerto)
60	GARDU BISMA	Dinas Kesehatan (Puskesmas Bantur)
61	" PETAN JIMAT " (Puskesmas Bantur)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Bantur)

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah
62	Jasubitoss	Dinas Kesehatan (Puskesmas Donomulyo)
63	GEMA SYAHDU	Dinas Kesehatan (Puskesmas Kalipare)
64	Gapura Emas Puskesmas Sumbermanjing Wetan	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sumbermanjing Wetan)
65	Program Kelas Calon Pengantin (kecamatan Kepanjen)	Kecamatan Kepanjen
66	Musuh TB " Penemuan Suspek oleh kader TB" (Puskesmas Ngantang)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Ngantang)
67	POSBINDU PTM MOBILE (Puskesmas Permata Turen)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Turen)
68	POSBINDU PTM Berbasis Komunitas Agama (Puskesmas Wajak)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Wajak)
69	KETAN IRENG (Kependudukan dan Kesehatan Mari Bareng)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
70	BUMBUNG PASIR CINTA	Dinas Kesehatan (Puskesmas Lawang)
71	GARDU CANDU (Gerakan Terpadu Cinta Anak dan Bunda)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Dampit)
72	PENDAWA (Penanganan Terpadu Kasus Jiwa)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Dau)
73	Prau kertas	Dinas Kesehatan (Puskesmas Pujon)
74	Intermillan jemput bola	Dinas Kesehatan (Puskesmas Pujon)
75	E-ADMINDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
76	Pelayanan Administrasi Online Desa (PAOD) 2.0	Kecamatan Wagir
77	PENGLARIS	Kecamatan Gedangan
78	TEST (Temukan Suspek Tuberkulosis dan HIV,dampingi penderita minum Pil)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Gondanglegi)
79	SUTRA EMAS (Surveilans Epidomolpgi Terpadu Berbasis Masyarakat) Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
80	Pelayanan Malam	Kecamatan Dampit
81	LAKABUM (Komputerisasi Pengelolaan Keuangan BUMdes Menggunakan Accurate Accounting)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
82	Aplikasi Asem Legi	Kecamatan Gondanglegi
83	Pustulan	Dinas Kesehatan (Puskesmas Singosari)
84	LASERIN SEGAR OLES	Dinas Kesehatan (Puskesmas Pakisaji)
85	MENDOL (Implementasi SIDA Online)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
86	Si MAKNYUS (Sistem Informasi yang Nyaman untuk Sehat)	Dinas Ketahanan Pangan
87	Si Mata Elang	Dinas Ketahanan Pangan

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah
88	Si Lumpang Mas (Sistem Informasi Lumbung Pangan masyarakat)	Dinas Ketahanan Pangan
89	Si Mantap (Sistem Informasi Manajemen Teknologi Aman Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan
90	SIKAP (Sistem Ketersediaan Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan
91	Si Brilliant (Sistem Informasi Brigade Perlindungan Tanaman)	Dinas Ketahanan Pangan
92	HEMOCARE PERMATA Puskesmas Turen	Dinas Kesehatan (Puskesmas Turen)
93	si dastan (sistem informasi data spasial lahan pertanian)	Dinas Ketahanan Pangan
94	SYAKIB (Selamatkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi) UPT Puskesmas Kasembon	Dinas Kesehatan (Puskesmas Kasembon)
95	Si Cakep (Sistem Informasi Catatan Kegiatan Pegawai)	Dinas Ketahanan Pangan

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah